

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bekasi masih memiliki beberapa kelemahan dan kendala yang perlu diperkuat.

1. Untuk Analisis Kebijakan atas Anggaran yang digunakan untuk Bansos pada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019 - 2022 secara umum kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan penyaluran yang tidak tepat sasaran, mekanisme verifikasi data yang belum optimal, dan kurangnya dokumentasi, pencatatan transaksi yang tidak akurat. Kelemahan tersebut menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas program Bansos, serta potensi penyimpangan dana Bansos. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang relevan dengan kondisi saat ini.
2. Untuk Analisis Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Bansos pada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019 – 2022 sudah berjalan dengan baik, seperti alur proses pelaporan dan

pertanggungjawaban yang jelas. Dan sistem yang ada telah memungkinkan pemerintah daerah untuk melacak penggunaan anggaran bansos. Namun, kualitas laporan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal detail dan ketepatan waktu. Selain itu, mekanisme pengawasan yang independen perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Serta kurangnya integrasi sistem, kapasitas SDM yang terbatas, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Kelemahan tersebut menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas program Bansos, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Implikasi

Implikasi Teoritis dan Praktis dari Analisis Kebijakan dan Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang tata kelola Bansos

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bansos yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan, dan pengawasan yang ketat.

b. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang efektivitas program Bansos

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Bansos tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas program, dan akuntabilitas pengelolaan dana.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Bekasi

- 1) Memperkuat regulasi Bansos, terutama terkait kriteria penerima, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan Bansos.
- 3) Membangun sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Bansos yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Bansos.
- 5) Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Bansos.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program Bansos.

- 2) Melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan Bansos.

c. Bagi Pemangku Kepentingan Lainnya

- 1) Memperkuat peran dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan program Bansos.
- 2) Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program Bansos.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian terkait Analisis Kebijakan dan Sistem Pelaporan Bansos di Kota Bekasi memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Kemungkinan terdapat data yang tidak terdokumentasikan atau tidak dapat diakses, sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan dan sistem pelaporan Bansos di Kota Bekasi.
2. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pejabat pemerintah daerah atau masyarakat penerima Bansos, sehingga tidak dapat menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi.
3. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.
4. Kemungkinan terdapat informasi yang tidak dapat diakses oleh peneliti karena alasan tertentu, sehingga penelitian ini tidak dapat

memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan yang dihadapi.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan:

1. Melakukan penelitian lapangan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi.
2. Memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak data dan informasi dari berbagai sumber dan memperluas akses informasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
3. mengalokasikan waktu yang lebih lama untuk pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, serta menggali lebih dalam berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian.
4. Memanfaatkan teknik pengumpulan data lainnya. Selain wawancara dan studi dokumen, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data lainnya seperti survei, observasi, dan focus group discussion (FGD). Teknik-teknik ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang dan memperkaya data penelitian.

Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif dan akurat tentang implementasi kebijakan dan sistem pelaporan Bansos di Kota Bekasi, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Bansos.